

MENGGAGAS PENDIDIKAN BERBASIS PLURALISME

Agustinus Pratisto Trinarso

Abstract

The idea of education based on pluralism leads the students to have good character, a positive attitude and to respect what may be different from what they personally hold. In itself, there is indeed a difference. In the face of such a difference, our attitude should be that of understanding, acceptance and to do what is fair on the basis of proportionate justice. On the other hand, discrimination is to do an injustice towards an individual or a group in society just because that individual or group is different in se.

There is also a difference that comes from a specific personal attitude or conviction. This difference is related to differing outlooks and ways of life that are embraced and lived by someone. When it comes to difference in conviction and the choice of religion, a person should learn how to live together in mutual tolerance, developing a sense of respect before such differences. In the face of such differences, a man may debate and present opposing arguments. Openness and room for discussion and dialogue should precisely be fostered when there are differences like this. Differences in mental frameworks and thought should be analysed in an atmosphere of freedom to hold an opinion, dialogue and communicate in a healthy way. An education based on pluralism teaches the student to develop a character that is wise, promotes the skill to manage differences and designs a strategy that would resolve these differences in a mature way.

Key Words

Difference. Education. Pluralism. Dialogue. Communication. Indonesia. Students. Tolerance. Respect.

Abstrak

Gagasan pendidikan berbasis pluralisme menegaskan sebuah pendidikan yang mengarahkan subjek-didik untuk memiliki karakter, sikap-sikap positif, respek, dan hormat terhadap apa yang berbeda. Ada perbedaan *in se*. Berhadapan dengan perbedaan semacam ini, sikap kita adalah memahami, menerima, dan memperlakukan secara setara berdasarkan prinsip keadilan proporsional. Sebaliknya, diskriminasi adalah perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu secara tidak adil hanya atas dasar perbedaan *in se*.

Ada pula perbedaan yang datang dari sikap atau keyakinan tertentu. Perbedaan ini berkaitan dengan pandangan-pandangan hidup dan jalan hidup (*way of life*) yang dihayati dan dijalani oleh seseorang. Berhadapan dengan perbedaan keyakinan dan penghayatan hidup beragama, seseorang harus belajar

bagaimana hidup bersama secara toleran, mengembangkan sikap hormat dan respek terhadap perbedaan tersebut. Ada pula perbedaan yang didasarkan atas konstruksi pemikiran dan mental tertentu. Berhadapan dengan perbedaan jenis ini, orang boleh dan bisa berdebat atau beradu argumentasi. Keterbukaan terhadap ruang-ruang diskursus dan dialog justru harus dikembangkan dalam perbedaan macam ini. Perbedaan dalam konstruksi pemikiran dan mental harus diuji dalam suasana kebebasan berpendapat, berdialog, dan berkomunikasi secara sehat. Pendidikan yang berbasis pluralisme mengajar subyek-didik untuk mengembangkan karakter yang cerdas serta kemampuan (*skill*) manajemen perbedaan dan strategi menghadapi perbedaan secara dewasa.

Kata-kata Kunci

Perbedaan. Pendidikan. Pluralisme. Dialog. Komunikasi. Indonesia. Subyek-didik. Murid. Toleransi. Hormat. Respek.

1. Pengantar

Membicarakan pluralisme bagi kita sebenarnya sebuah hal yang naif karena dalam realitas hidup sehari-hari sebagai bangsa Indonesia, kita mengalami pluralisme sebagai realitas yang sudah sudah terkandung di dalamnya. Hal ini seperti ibarat membicarakan pentingnya air bagi ikan. Bagi bangsa lain dapat saja pluralisme menjadi sebuah kajian baru dalam menghadapi perubahan jaman dan perkembangan demografi penduduknya, akan tetapi bagi bangsa Indonesia yang telah terbentuk dari keanekaragaman suku dan bangsa, pluralisme sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari.

Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saat pluralisme digagas secara serius bagi kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan. Ada hal-hal yang ternyata sudah tidak lagi ada dan berkembang dalam konteks alamiahnya, yang tadinya diandaikan ada, sehingga perlu menjadi sebuah pembahasan yang cukup marak belakangan ini terutama menyangkut pendidikan. Secara khusus hal ini juga dibahas dalam kurikulum pendidikan nasional 2013. Makin maraknya perselisihan dan konflik sosial di negara kita yang menunjukkan menguatnya semangat primordial dan sektarian, dan yang mengutamakan kelompok atau golongan daripada pengutamaan kepentingan umum, menjadi penanda bagi kepentingan kita untuk berbicara tentang “Menggagas Pendidikan Berbasis Pluralisme”.

Pertanyaan kita adalah: Apakah pendidikan berbasis pluralisme layak ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini?

2. Pengertian Ambigu Tentang Pluralisme

Beberapa waktu yang lalu, MUI menerbitkan fatwa yang pada intinya menolak paham pluralisme untuk ditumbuhkan di Indonesia. Lembaga keagamaan ini mensinyalir bahwa pluralisme yang sengaja dikembangkan di Indonesia saat ini sebenarnya berisi paham-paham sekularisme dan liberalisme yang dapat merusak hidup keagamaan. Fakta lain menunjukkan sebaliknya. Gus Dur mengakui adanya agama Kong hu cu dan membuka kesempatan bagi kebudayaan cina untuk eksis dan berkembang di Indonesia (dengan alasan itulah beliau dijuluki sebagai bapak pluralisme Indonesia).

Bagaimana sebetulnya kita mesti memaknai pluralisme ini? Meninjau kembali pemahaman kita tentang pluralisme ini penting mengingat bahwa hal ini sudah diangkat sebagai persoalan berskala nasional serta mengundang pro dan kontra dalam kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Fenomena yang nampak dominan di sini adalah bahwa pluralisme yang praktis selalu dikaitkan dengan hidup beragama di Indonesia. Pluralisme hidup beragama mengetengahkan sikap menghormati dan menghargai perbedaan dalam agama-agama yang ada di tanah air tanpa arogansi sikap yang merasa diri paling benar dalam setiap klaim kebenaran agama. Nampaknya justru hal inilah yang mengundang perdebatan berskala nasional.

Perdebatan atas kemurnian pengertian pluralisme memuncak pada saat MUI mengeluarkan fatwa kesesatan tentang SIPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) pada Musyawarah Nasional (Munas) VII, 26-29 Juli 2005. Situasi pro dan kontra tentang pluralisme kehidupan beragama dan berbangsa berlangsung memanas dengan munculnya gugatan atau permohonan *judicial review* terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Gugatan diajukan oleh 11 (sebelas) pemohon yang terdiri dari 7 (tujuh)

pemohon LSM, yakni Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Setara, Desantara, YLBHI dan 4 (empat) pemohon perorangan. Menurut para pemohon, apa yang dianggap benar oleh suatu kelompok/aliran belum tentu benar bagi kelompok lain. Karena itu, tidak boleh satu kelompok mengklaim kelompok lain menyimpang; begitu pun sebaliknya. Negara juga tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan negara tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara.¹

Secara hukum tata kenegaraan, negara Indonesia bukan negara agama dan juga bukan penganut agama tunggal. Indonesia mengakui adanya pluralitas agama yakni adanya enam agama yang dianut oleh warga negaranya yakni agama Islam, Kristen, katolik, Hindu dan Buddha serta Khong hu chu. Dalam interaksi masyarakat, kehidupan antar umat beragama memiliki dinamika yang menarik untuk diamati, karena banyak ketegangan yang tensinya dari bernada lemah sampai yang cukup kuat dan krusial seperti konflik antar agama di Poso dan Ambon. Meskipun ada banyak ketegangan, banyak pengamat menyebutnya karena dipicu faktor diluar agama, yakni faktor politik sektarian dll., namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama-agama dan penganutnya dalam konteks hidup bersama tetap memberikan permasalahan yang perlu disikapi dengan tepat.

Pluralisme agama banyak dicurigai sebagai paham yang diterjemahkan dari liberalisme dan memiliki unsur relativisme kebenaran. Dalam pluralisme bisa jadi terdapat relativisme iman dimana melihat bahwa semua agama mengajarkan kebenaran untuk menuju pada satu yang absolut dan mutlak yakni Tuhan sendiri. Dalam logika terbalik dapat dikatakan bahwa kebenaran yang ada di masing-masing agama adalah parsial saja, jadi bukanlah kebenaran yang sejati dan yang sesungguhnya. Apabila dinilai sebagai kebenaran subyektif berarti kebenaran yang hanya dibawa oleh tokoh pendirinya saja dan belum mencapai kebenaran yang mutlak.

Paham pluralisme yang berkaitan dengan budaya disebut juga

1 Sumber: www.adianhusaini.com

sebagai multikulturalisme. Pengertian tentang budaya itu sendiri merupakan suatu pandangan menyeluruh atas pola hidup manusia dan sifatnya luas, abstrak serta kompleks karena menyangkut sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian dan bangunan serta karya seni. Budaya memiliki sifat dapat dipelajari, karena manusia bisa hidup dan berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya serta menjalin komunikasi dengan baik tanpa kehilangan identitas budayanya.² Budaya memiliki sifat yang kompleks dan rumit namun erat berhubungan dengan masyarakatnya sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh budaya yang dimilikinya. Budaya juga memiliki sifat pewarisan sehingga kadang dinilai sebagai *superorganic* bahkan dinilai diwariskan secara genetis.³ Multikulturalisme adalah pandangan yang menghargai kemajemukan serta penghormatan terhadap yang lain yang berbeda, membuka diri terhadap kekayaan budaya yang lainnya serta melibatkan diri secara aktif untuk mencari persamaan dalam hidup bersama sambil tetap menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada.⁴ Adanya keberagaman budaya dalam bangsa Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri sedemikian hingga keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia sejak diproklamasikan. Amanat hidup dalam keragaman dengan damai terkandung dalam lambang dan semboyan hidup bangsa yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua.⁵

2 Budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Sanskerta yakni *Buddhayah* yang berarti buddhi atau akal budi sedangkan dalam bahasa Inggris, Culture, berasal dari bahasa latin, colere yang artinya mengerjakan atau mengolah. Culture juga diartikan kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya dan kultur dipandang searti dalam bahasa Indonesia.

3 Bdk., Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, Pgrave, New York 2000, 143.

4 Bdk., William Chang, 181." *Soko guru pemberdayaan konteks multikultural ini mengandalkan proses internalisasi nilai-nilai humaniora yang menyentuh setiap anasir dalam masyarakat.*" Bdk. Juga dgn Bhikku Parekh, 156.

5 Bdk., Sal Murgiyanto, *Multikulturalisme dalam seni pertunjukan: Ragam bentuk dan Motif*, dalam *Keragaman & Silang Budaya: Dialog art-Summit*, MSPI, Bandung 1999, 75. " *multikulturalisme Indonesia tercermin dalam motto: Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana motto ini harus diletakkan dalam praktek-untuk membolehkan beragam kebudayaan hidup bersama-sama dalam damai,...*"

Sering terjadi bahwa pengertian-pengertian antara pluralitas dan pluralisme tercampur-aduk sehingga sehingga tafsir atas pluralisme menjadi beragam, mulai dari yang bersifat “netral” sampai yang bersifat tuduhan bahwa pluralisme adalah sebuah agama baru atau ideologi baru atas agama-agama. Pluralitas dan pluralisme perlu dibedakan. Pluralitas adalah kenyataan adanya kemajuan dan perbedaan dalam konteks hidup manusia menyangkut suku, agama, ras, kepercayaan, adat budaya dan yang lainnya, sedangkan pluralisme adalah sebuah sikap yang menghargai adanya kemajuan dan menghormati adanya perbedaan yang ada tanpa adanya tendensi klaim atas sebuah kebenaran apa pun. Sikap dalam pluralisme adalah keterbukaan atas adanya berbagai paham kebenaran dan menghargainya tanpa melihat nilai kebenarannya itu sama.⁶

3. Kebutuhan Pendidikan Pluralisme Dalam Budaya Indonesia

Pendidikan berbasis pluralisme di tanah air dibutuhkan karena beberapa alasan. Setelah rezim Orde baru tumbang dan kehidupan demokrasi meningkat kualitasnya di masyarakat Indonesia, di mana kadar represi pemerintah dan militer terhadap gerakan pro-demokrasi berkurang, gejala sektarian justru meningkat. Angin kebebasan yang dibawa oleh iklim demokrasi yang membaik ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai ruang untuk memaksakan kepentingan kelompoknya. Padahal pluralisme berhubungan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pluralisme juga berkenaan dengan hak hidup dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut memiliki budayanya masing-masing dan keberadaannya diakui oleh negara.

Di era globalisasi ini, budaya Indonesia perlahan mulai sirna dan berganti dengan budaya modern. Masyarakat Indonesia sedang mengalami transformasi budaya kearah modern yang sebenarnya dapat disebut penjajahan bentuk baru, yakni “pemaksaan” budaya modern secara halus melalui mass-media dan kecanggihan teknologi. Sesungguhnya,

6 Bdk., Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme, Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama*, Elex Media Computindo, Jakarta 2012, 70-71.

bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman dalam budaya sedang mengarah pada monokultur atau satu budaya, yakni budaya modern. Jejak keberagaman budaya nasional masih nampak jelas, namun hanya nampak di taraf permukaan, misalnya baju adat, kesenian tradisional, rumah adat, tata desa dan yang sebagainya. Sementara itu, nilai-nilai yang dikandung yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku warga negara, perlahan mengarah pada nilai-nilai modern yang sebenarnya belum jelas benar orientasinya. Bukan berarti bahwa kita mau menjadi negara yang menutup diri dari globalisasi dan dampaknya, namun kiranya kesadaran akan pentingnya penghargaan atas budaya bangsa sebagai jati diri dan “perawatannya” dengan baik dan benar akan banyak mendatangkan manfaat bagi pembangunan karakter bangsa. Selain masyarakat, tentunya pemerintah perlu lebih tanggap akan situasi anak bangsa dewasa ini agar lebih mengedepankan pendidikan karakter bangsa yang khas daripada sekedar menjadi “corong” kapitalisme global yang mengusung budaya lain hanya demi laju pertumbuhan di bidang ekonomi semata.⁷

Pluralisme budaya atau multikulturalisme yang ditanamkan dengan baik akan menimbulkan rasa penghargaan dan toleransi antar komunitas budaya yang berbeda. Kekuatan setiap kelompok komunitas budaya apabila disatukan akan menjadi pengikat dari negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Pendidikan berbasis pluralisme budaya akan menumbuh-kembangkan subyek didik dalam memiliki sikap saling menghargai, saling menjunjung tinggi dan menghormati, bertoleransi dan mampu hidup dan tumbuh dalam keragaman budaya.

4. Pendidikan Berbasis Pluralisme

4.1. Hakikat Pendidikan multikultural

Pendidikan pluralisme berkaitan erat dengan epistemologi sosial.

⁷ “Nilai-nilai ekonomi kerakyatan sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi pro “kapital”. Pasar-pasar tradisional digusur digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang.” Lih., Benny Susetyo, *Habitus Dialog dalam konteks Indonesia*, Komisi HAK KWI, Jakarta 2008, 110.

Epistemologi adalah dasar mengapa keilmuan itu ada dan bagaimana sudut pandang sebuah keilmuan itu terhadap kebenaran. Epistemologi dalam filsafat terarah pada asal-usul kebenaran. Epistemologi pluralisme mau memaknai epistemologi dalam kerangka sosial. Artinya, epistemologi yang memandang kebenaran dalam keragaman arti dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Semua hal yang dipandang sebagai kebenaran berlaku sebagai yang baik bagi masyarakat.⁸ Dalam epistemologi sosial, tidak ada satu kebenaran mutlak yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu pluralisme memiliki hakekat keragaman sedemikian hingga pendidikan yang berbasis pluralisme mengarahkan manusia pada kemampuan melihat keragaman sebagai yang baik dan semuanya memiliki kontribusi atas masyarakatnya.

Pendidikan berbasis pluralisme adalah pendidikan yang memiliki dasar keterbukaan.⁹ Keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini adalah keterbukaan dalam berpikir dan bersikap. James Banks sebagai pelopor pendidikan multikulturalisme meyakinkan bahwa pendidikan dalam pluralisme adalah mengajari siswa tentang bagaimana memahami semua pengetahuan, bagaimana konstruksi pengetahuan itu dibangun, dan bagaimana terjadinya interpretasi yang berbeda-beda. Siswa belajar bahwa dalam pengetahuan yang diajarkan itu juga terdapat aneka interpretasi yang nampak bertentangan atau berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Dalam pendidikan semacam ini, siswa dibiasakan menerima perbedaan cara pandang atas sebuah kebenaran dan implikasinya dalam kehidupan.

Lebih lanjut, pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menjelaskan adanya rangkaian kepercayaan (*notion of belief*) serta pengakuan adanya keragaman budaya dimana di dalamnya terdapat keragaman gaya hidup, interaksi sosial, pengalaman khas budaya yang membentuk identitas pribadi, relasi sosial yang ada serta hubungan

8 Bdk., Frans Ceufin (Ed.), *Hak-hak asasi manusia, Aneka Suara & Pandangan*, Penerbit Ledalero, Maumere 2006, 94.

9 Bdk., Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, 228.

antar masyarakat. Subjek didik diajar untuk berbagi pengalaman dalam perjumpaan dengan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaannya sendiri. Sikap dasarnya adalah bahwa setiap subjek didik adalah subjek yang berakar dalam kebudayaannya sendiri yang juga memiliki kesempatan yang sama dengan orang berlatar belakang kebudayaan yang berbeda darinya, untuk tumbuh berkembang dalam pendidikan.

Pendidikan multikulturalisme jugaseharusnya memberi kompetensi multikultural yakni kemampuan hidup (*life skill*) dalam keberagaman. Seringkali pendidikan yang dominan dalam sebuah budaya dapat menjebak dalam paradigma tertentu yang mengarah pada primordialisme kesukuan, agama dan golongan secara berlebihan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan manusia mudah terseret dalam konflik sektarian, yaitu karena tidak memiliki wawasan dan kompetensi multikultural. Parekh melihat bahwa kompetensi multikultur menjadi penting di era globalisasi ini sebagai bekal bagi siswa dalam mengembangkan diri di tengah keberagaman. Sejak dini, pendidikan mengarahkan subjek didik untuk belajar memiliki kompetensi dalam memahami perbedaan budaya, baik dalam tingkah laku, dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dalam norma-norma dan aturan hidup, serta dalam adat-istiadat. Harapannya, siswa memiliki ketrampilan dalam menerima perbedaan, kritik, termasuk juga dalam kemampuan bertoleransi dan berempati kepada sesamanya.¹⁰

4.2. Syarat dan pendidikan pluralisme

Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan pengertian dan nilai tertentu pada subjek didik dengan tujuan agar pengertian dan nilai-nilai yang diajarkan itu menjadi “miliknya”, sedemikian hingga dapat berguna bagi kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan berbasis pluralisme adalah pendidikan yang menanamkan sikap-sikap yang berdasarkan nilai-nilai keragaman dalam hidup bersama. Pendidikan berbasis pluralisme ini dapat diterapkan dalam bentuk-bentuk pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah-

10 Bdk. Ibid.,229.

sekolah formal (yang terkait kultur sekolah yang menyangkut identitas dan ciri khas sekolah), politik pendidikan, kurikulum, bidang studi, serta lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan berbasis pluralisme, lingkungan sekolah formal menjadi wilayah yang perlu dipelihara dalam suasana multikultural yang kondusif. Siswa dikondisikan untuk selalu hadir dalam susana yang beragam dan diperlakukan setara. Subjek didik diajak untuk saling menghargai latar belakang dan karakteristik budaya yang memberi ciri khas bagi perilaku seseorang dalam suasana hidup damai, saling memahami, saling menghargai demi mencapai tujuan hidup bersama dalam persatuan dan keragaman.

Dalam diri siswa di lingkungan pendidikan formal ditanamkan pemikiran lateral, yakni saling belajar dalam latar-belakang kebudayaan yang berbeda, berinteraksi dan komunikasi dengan tujuan belajar yakni saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Pendidikan multikultural juga mencakup materi pengajaran tentang etnis dan ras, agama dan perbedaannya, kondisi ekonomi, jenis kelamin, perbedaan umur, dan lain sebagainya. Siswa dapat diajar tentang kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaannya sendiri, kemudian belajar untuk mensikapinya dengan benar sehingga mereka tumbuh dalam sikap hormat dan simpatik.¹¹

Sementara itu, dalam pendidikan informal, yang biasanya terjadi dalam keluarga dan masyarakat, seorang anak dapat belajar sikap-sikap multikultural dari orang tuanya dan teman-teman di lingkungannya. Lingkungan sosial yang cukup heterogen biasanya lebih cocok untuk belajar tentang multikulturalisme daripada lingkungan sosial yang cenderung homogen. Dlaam hal ini, kebijakan politik dalam pembangunan dan kependudukan menentukan bagaimana sikap pluralisme dapat dimiliki dengan baik.

Globalisasi yang cenderung terarah pada ekonomi bebas telah menyuburkan kapitalisme, lantas berdampak pada pengaturan kependudukan, khususnya pada pengaturan perumahan. Munculnya

11 Bdk., pendapat Yunasril Ali, 72. "*Pendeknya, pluralisme merupakan basis bagi terciptanya kerukunan yang dinamis dan dialogis dalam masyarakat majemuk...*".

kawasan-kawasan perumahan elite yang menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi sosial masyarakat cenderung tidak menunjang pendidikan multikulturalisme. Hal ini senada dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini dengan adanya sekolah-sekolah elite yang cenderung mengklasifikasi masyarakat secara ekonomis dan etnis.

4.3. Bentuk Pendidikan Pluralisme

Bentuk pendidikan pluralisme bagi bangsa Indonesia adalah bentuk pendidikan yang bercirikan pendidikan yang menyediakan keberagaman dan perbedaan. Ini berkaitan dengan hakekat pendidikan karakter yang mau menumbuhkan subjek didik dalam memiliki pengetahuan dan wawasan akan keberagaman. Harapannya, siswa mampu bersikap kritis dan melakukan koreksi atas situasi keberagaman.¹²

Dalam pendidikan sikap dan karakter keberagaman, pendidikan pluralisme berfungsi menyemai dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi budaya, penghormatan pada setiap identitas budaya, sikap responsif atas budaya dan ketrampilan dalam resolusi konflik. Dalam tingkat kognitif, pendidikan pluralisme ini berfungsi untuk menanamkan pengetahuan tentang kemajemukan bangsa, kemampuan untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku budaya, serta kemampuan untuk memiliki kesadaran kritis atas budayanya sendiri. Dalam penerapannya secara psikomotorik, pendidikan pluralisme berfungsi mengembangkan subjek didik agar memiliki kemampuan koreksi atas asumsi salah kaprah, distorsi budaya, stereotipe budaya, strategi hidup multi budaya dan ketrampilan komunikasi sinergi budaya serta kemampuan teknik evaluasi-eksposisi atas dinamika budaya.¹³

12 Bdk., William Chang, *Perilaku Multikultural sebagai Habitus*, dalam *Dialog iman dan Budaya*, Komisi Teologi KWI, Jakarta 2006, 180.

13 Ilh., Karim H. Karim, *The Elusiveness of Full Citizenship: Accounting for Cultural Capital, Cultural Competencies and Cultural Pluralism*, dalam: *Accounting for Culture: Thinking through cultural citizenship*, ed. Caroline Andrew dkk., The University of Ottawa Press (UOP), Ottawa, 152.

5. Tantangan Dalam Pendidikan Berbasis Pluralisme

5.1. Kualitas hidup kebangsaan

Menurut Prof. Mohammad Nuh selaku menteri pendidikan saat ini, lahirnya kurikulum pendidikan Nasional 2013 didorong oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia khususnya dalam hidup berbangsa dan bernegara dan sekaligus juga atas keprihatinan terhadap peri-hidup masyarakat yang cenderung semakin intoleran dan sektarian. Maraknya konflik sosial dengan latar belakang masalah perbedaan dan keragaman menjadi salah satu pendorong lahirnya kurikulum yang baru saat ini.

Hal pertama yang patut disorot di sini adalah lemahnya kesadaran akan keberagaman bangsa dan juga lemahnya semangat nasionalisme. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pendidikan dan norma-norma sosial yang seringkali terlalu menekankan kesatuan di satu pihak sementara kurang mengolah kemajemukan bangsa di lain pihak.¹⁴ Bila mengacu pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, maka yang lebih ditekankan adalah unsur “ika” daripada “bhineka”. Keberagaman bangsa seperti suku, agama, ras dan golongan yang menjadi kekuatan bangsa kurang dikembangkan. Ironisnya, pada era orde baru keberagaman ini sering dianggap tabu untuk didiskusikan. Akibatnya, sejak masa reformasi hingga sekarang ini, kualitas hidup kebangsaan dalam konteks kemajemukan kurang digarap dan dikembangkan dengan baik. Pendidikan kebangsaan yang berbasis pluralisme bangsa nampaknya menjadi kebutuhan saat ini.

5.2. Budaya Monokultural sebagai Akibat Arus Globalisasi

Globalisasi yang menawarkan keterbukaan di era informasi ini jelas merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia karena terjadi interaksi

14 Secara politis, rezim orde baru sebenarnya menyadari pentingnya tata nilai yang sifatnya harus dapat dipegang bersama ditengah keragaman budaya sehingga dapat mempersatukan berbagai suku bangsa ataupun mewadahi aneka nilai budaya yang ada yakni dengan pendidikan Pancasila. Hanya saja penanaman nilai pancasila dan P4 dalam bentuk indoktrinasi yang sifatnya kurang luwes justru telah menimbulkan antipati yang cukup signifikan.

yang intensif dengan budaya luar. Budaya luar yang masuk ke Indonesia adalah budaya yang berkuasa dan kuat. Artinya, budaya yang memiliki kekuatan teknologi, yang jaringannya mendunia serta berbasis ekonomi global dan memiliki kekuasaan dalam percaturan politik. Budaya tersebut bukanlah budaya yang beragam tetapi budaya yang cenderung mengusung budaya dari negara-negara adikuasa.¹⁵ Dikatakan, budaya tersebut berciri monokultur dan homogen dan masuk dengan membawa nilai-nilai yang menggiurkan untuk segera diterima dan dihidupi oleh bangsa Indonesia. Nilai monokultur dan homogen yang dimaksud di sini yakni nilai yang di dalamnya mengandung kemajuan, *up to date*, hebat, canggih dan modern. Budaya monokultur ini bukan hanya merambah wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun juga sudah merambah wilayah gaya hidup, kuliner, dan orientasi spiritual.¹⁶ Kita dapat melihat “agen-agen” monokultural bercokol di Indonesia dan diterima dengan cukup antusias, seperti KFC, McDonald, musik barat, film Hollywood, trend motivator, dan lain sebagainya. Budaya ini mudah masuk ke dalam sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia karena kekuatan media, dalam hal ini televisi yang telah dimiliki oleh masyarakat hampir di seantero wilayah di Indonesia dan diinput setiap hari oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Kita sudah semakin biasa melihat bahwa tidak ada perbedaan dalam gaya berpakaian dan gaya berkomunikasi anak muda baik di kota maupun di desa, atau dalam alam budaya yang satu dan alam budaya lainnya.

Gejala menguatnya budaya monokultur dan global tersebut (yang nota bene sebetulnya merupakan budaya dari satu bangsa tertentu) jelas menantang keberadaan budaya-budaya khas Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan multikulturalisme berusaha menyadarkan adanya keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri dalam kebudayaannya. Bahwa nilai-nilai yang dikandungnya juga mampu

15 Bdk., Yves Brunsvick & Andre Danzin, *Lahirnya Sebuah Peradaban, Guncangan Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta 2005, 23.

16 “Positifisme-Materialisme-Hedonisme adalah haluan hidup manusia modern, karena: (1) gampang, (2) praktis, (3) instant.”, Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme, Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama*, Elex Media Computindo, Jakarta 2012, 253-262.

menjadi roh dan jiwa bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

5.3. Politik Pemerintah Yang Berorientasi Ekonomi

Kebijakan pemerintah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sekaligus mengabaikan kepentingan pendidikan kebangsaan dapat menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Pendidikan yang berorientasi pasar bebas dengan pengutamaan pada *skill* kompetensi industri dengan tujuan agar mampu bersaing dengan negara lain, bila tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa tukang dan terlepas dari akar budayanya sendiri.¹⁷

Politik yang semata-mata berorientasi ekonomi juga secara perlahan mengklasifikasi masyarakat dalam ranah ekonomi kesejahteraan dan pada gilirannya justru memantik kecenderungan pada kesenjangan sosial-ekonomi. Padahal, kesenjangan inilah yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik sosial-sektarian. Dalam hal ini, kekhasan suku, agama dan golongan dijadikan alat legitimasi untuk tawar-menawar demi kesejahteraan masyarakat dan daerah tertentu.

Nyatanya, politik ekonomi juga merambah dunia pendidikan yang pada gilirannya cenderung merangsang tumbuhnya kapitalisme dalam dunia pendidikan. Inilah persisnya yang menimbulkan maraknya sekolah-sekolah RSBI dan sekolah-sekolah elite yang mengkondisikan cepat-tumbuhnya kesenjangan sosial yang lebih parah dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena kualitas anak bangsa sejak dini sudah tersekat-sekat. Mereka cenderung menjadi gagap dalam berdialog dan bertoleransi.

Kebijakan ekonomi dalam dunia pendidikan juga tidak luput dari sektarianisme berbau agama. Hal ini seringkali nampak dalam bentuk

17 “Nilai-nilai ekonomi kerakyatan sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi pro “kapital”. Pasar-pasar tradisional digusur digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang.” Lih., Benny Susetyo, *Habitus Dialog dalam konteks Indonesia*, Komisi HAK KWI, Jakarta 2008, 110.

bantuan khusus pemerintah melalui departemen agama. Kebijakan dengan modus seperti itu seringkali mensyaratkan bahwa calon siswa dalam lembaga pendidikan penerima bantuan harus beragama tertentu. Kebijakan semacam ini tentu bisa menjadi gejala eksklusivitas pendidikan berbasis agama. Ini tentu juga bisa menjadi bahaya laten fundamentalisme yang merongrong keberagaman bangsa Indonesia. Bila lingkungan sekolah yang homogen yang kurang mendukung keberagaman, maka pendidikan berbasis multikulturalisme akan mengalami hambatan.

Kebijakan otonomi daerah yang tidak terkontrol tidak jarang juga menjadi faktor terhambatnya perkembangan visi keberagaman hidup berbangsa Indonesia. Tidak jarang terjadi peraturan dan kebijakan daerah memiliki orientasi sektarian dan nilai-nilainya justru berlawanan dengan semangat demokrasi itu sendiri, yaitu nilai-nilai yang mengajarkan persamaan hak dan kedudukan, sikap egaliter dan keterbukaan. Munculnya kebijakan otonomi khusus yang bertendensi pada kepentingan agama tertentu jelas menjadi tantangan dalam pendidikan pluralisme bangsa.

6. Penutup

Kajian atas tema pendidikan dan pluralitas bangsa mengajak kita untuk memikirkan kembali banyak hal dalam ranah kehidupan kita sehari-hari. Beberapa keprihatinan atas hal-hal yang krusial di dunia pendidikan dan perpolitikan dewasa ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pluralisme menjadi perlu diperhatikan apabila kita semua menginginkan bahwa karakter bangsa kita menjadi lebih baik. Kepemimpinan bangsa di masa depan sangat ditentukan bagaimana pendidikan karakter yang ada saat ini. Pemimpin bangsa yang memiliki ketrampilan dan wawasan belumlah mencukupi untuk memimpin bangsa Indonesia apabila belum dilengkapi atau belum memiliki kemampuan dalam mengelola pluralisme bangsa.

Pendidikan berbasis pluralisme masih belum banyak dipahami dalam dunia pendidikan di Indonesia. Secercah harapan ada pada kurikulum 2013 yang berusaha memuat keprihatinan atas pluralisme bangsa. Dalam

tataran hidup masyarakat, pluralisme atau multikulturalisme perlu dihadirkan untuk memperluas wacana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat keluar dari jurang egoisme kelompok dan sektarian yang dapat memecah belah bangsa. Demikian juga pemerintah perlu memiliki orientasi multikulturalisme dalam menentukan arah kebijakannya agar berbagai kebijakan yang diambil tidak mudah menimbulkan konflik sosial ekonomi. Pemerintah dan masyarakat di era globalisasi dan demokrasi ini dipanggil untuk arif dalam bagaimana mengelola keberagaman bangsa agar tercapai Indonesia yang damai dan demokratis.

Agustinus Pratisto Trinarso

Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya. Mengajar dan meminati Filsafat Politik dan Estetika.

Daftar Rujukan

- Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, Pgrave, New York 2000.
- Benny Susetyo, *Habitus Dialog dalam konteks Indonesia*, Komisi HAK KWI, Jakarta 2008.
- Charles H. Patterson, "*Philosophy an Introduction*, terj: *Filsafat*, Made Sukarata (pentj.), Pstaka Intelektual, Surabaya 2009.
- Frans Ceunfin (Ed.), *Hak-hak asasi manusia, Aneka Suara & Pandangan*, Penerbit Ledalero, Maumere 2006.
- Karim H. Karim, *The Elusiveness of Full Citizenship: Accounting for Cultural Capital, Cultural Competencies and Cultural Pluralism*, dalam: *Accounting for Culture: Thinking through cultural citizenship*, ed. Caroline Andrew dkk., The University of Ottawa Press (UOP), Ottawa.

Linda Smith & William Raeper, *A Beginner's Guide to Ideas*, terj. *Ide-Ide, Filsafat dan Agama, Dahulu dan Sekarang*, Kanisius Yogyakarta 2000.

Sal Murgiyanto, *Multikulturalisme dalam seni pertunjukan: Ragam bentuk dan Motif*, dalam *Keragaman & Silang Budaya : Dialog art-Summit*, MSPI, Bandung 1999.

Yves Brunsvick & Andre Danzin, *Lahirnya Sebuah Peradaban, Goncangan Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta 2005.

Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme, Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama*, Elex Media Computindo, Jakarta 2012.